

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bagir Manan, 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Universitas Bandung
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- E. Prajwalita, 2016. *Menjejalkan Legislasi Berbasis HAM*, Jakarta: Rajawali Press
- HAW Widjaja, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Jazini Hamidi, 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing
- Kusnu Goesniaddhie, 2006. *Harmonisasi Hukum dalam Prespektif Perundang-undangan*, Jakarta: JP BOOKS
- Majda El Mahtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Indonesia Kencana
- Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisilis
- Moh Hasan, 2012. *Analisis Terhadap Pembuatan Kerjasama Internasional*, Jakarta: Azza Grafika
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2006, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- , 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suhariyono, 2007. *Peranan Kantor Wilayah Dapertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda*, Jakarta: Rajawali Press
- Sumadi Suryabrata, 1983. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tahun tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung

C. Tesis

Inche Sayuna, 2016, Tesis: Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otensitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Universitas Sebelas Maret.

D. Jurnal

Isrok, "Korelasi Antara Perda Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Di Daerah" Jurnal Hukum Vol 16 No. 4 Tahun 2009

Janpatar Sumamora, *“Considering Centralization Of Judicial Review Authority in Indonesian Constitutional System”* Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 21 No.26-23 Tahun 2016

Riski Dian Novita Rahayu Rochim, *“Harmonisasi Norma-norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim”* Jurnal Ilmiah Halaman 7 Tahun 2014

Taufik Simatupang, *“Peran Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah”* Jurnal Hukum Vol 11 No. 1 tahun 2017

E. Website

Supratman, Agung. 2014. Konsep Pembagian Kekuasaan Negara.<http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagiankekuasaan-negara-di.html>

Kemenkumham. 2016. Karya Ilmiah Birokrasi.
http://kumhamjakarta.info/download/cat_view/54-karya-ilmiah/61-birokrasi

Kompas. 2016. Kemendagri Tegaskan Pembatalan Perda Sesuai Aturan.<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/16/16372801/kemendagri.tegaskan.pembatalan.3.143.perda.sesuai.aturan>.

AA, Okta Mahendra. 2016. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>



